

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG KEMUNCULAN SURAT KABAR BERBAHASA SUNDA DI PRIANGAN**

#### **2.1 Peran Surat Kabar dalam Kehidupan Bumiputera**

Masyarakat Bumiputera pada masa pemerintahan kolonial merasakan banyak keterbatasan. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan dan situasi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Keterbatasan tersebut tidak hanya terbatas pada infrastruktur, tetapi juga mencakup pengetahuan dan akses terhadap pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda menempatkan masyarakat Bumiputera terutama masyarakat kalangan bawah yang diperlakukan secara kasar dan tidak adil. Pendidikan yang diterima masyarakat Bumiputera hanya didapat oleh golongan tertentu saja.<sup>22</sup> Masyarakat Bumiputera memiliki pengetahuan yang sangat minim termasuk dalam pengetahuan Bahasa yang menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi yang memprihatinkan yang dialami masyarakat Bumiputera melahirkan suatu kebutuhan terkait permasalahan di samping pemerintahan kolonial yang tidak berupaya memajukan kesejahteraan masyarakat Bumiputera. Kebijakan pemerintahan kolonial berupaya mengekang beberapa perkembangan dalam kehidupan masyarakat Bumiputera salah satunya surat kabar di Hindia Belanda.<sup>23</sup> Surat kabar sebagai media massa pada masa ini didominasi oleh surat

---

<sup>22</sup> Septian Teguh Wijiyanto, "Sekolah Raja (Hoofdenschool) sebagai Sekolah Pangreh Praja 1865-1900". *Jurnal Komunikasi*, Vol.11, No.1, 2016, hlm.62

<sup>23</sup> Miftahul Habib Fachrurozi, "Politik Etis dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputera", *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, Vol.2, No.1, 2019, hlm.23-24

kabar yang bersifat missionaris dan perekonomian di Hindia Belanda. Surat kabar berkembang menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat Bumiputera pada masa kolonial, menyediakan berita tentang kegiatan pemerintah kolonial, perkembangan politik, sosial, dan ekonomi.

Masyarakat Bumiputera perlu untuk terhubung dengan perkembangan, termasuk informasi tentang politik, perdagangan, budaya, dan peristiwa sosial lainnya yang memengaruhi kehidupan secara langsung. Kebijakan politik etis mendorong para terpelajar untuk mengembangkan surat kabar Bumiputera. Para golongan terpelajar yang mendorong perkembangan surat kabar mengoptimalkan penggunaan surat kabar untuk masyarakat termasuk dimuat berbagai kritikan terhadap pemerintahan. Surat kabar Bumiputera menjadi salah satu media untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat yang terkadang mendapat kecaman dari pemerintahan.

Surat kabar menjadi media bagi masyarakat Bumiputera untuk berbagi pengalaman dan ide. Media ini pada masa kolonial juga digunakan sebagai media komunikasi terkait berbagai hal yang berkaitan dengan politik. Para golongan terpelajar juga menyertakan nilai-nilai nasionalisme dalam surat kabar. Media massa ini pada perkembangannya digunakan sebagai media perjuangan. Hadirnya surat kabar menjadi solusi kebutuhan pengetahuan dari segala aspek baik budaya, kesastraan, politik, perekonomian, pengetahuan dasar sehari-hari dan kesehatan, serta hiburan sehingga masyarakat Priangan merasa penting dan menarik dengan hadirnya surat kabar Bumiputra.

## 2.2 Munculnya Surat Kabar Bumiputera

Percetakan di Hindia Belanda diawali oleh perjalanan surat kabar yang erat kaitannya dengan kondisi masyarakat, kebudayaan, dan politik pada masa tersebut. Pengaruh kondisi tersebut terlihat dalam perkembangan surat kabar di Hindia Belanda ditandai dengan munculnya berbagai jenis surat kabar seperti surat kabar Belanda, surat kabar Melayu, surat kabar Tionghoa, dan surat kabar Bumiputera. Dalam perkembangannya, berbagai jenis surat kabar ini juga membawa variasi dalam penggunaan bahasa, mencerminkan keragaman budaya dan perubahan sosial pada saat itu.

Surat kabar Bumiputera muncul sejak pertengahan abad ke-19, pada masa ini bermunculan surat kabar swasta di Hindia Belanda.<sup>24</sup> Media massa ini sebagai salah satu media cetak yang terbit pada waktu itu didominasi dan dipengaruhi oleh bangsa asing, kondisi sosial ekonomi Bumiputera yang tidak memungkinkan menjadi kendala dalam kepemilikan mesin cetak yang terbatas pada kalangan tertentu. Selain itu, peraturan yang diberlakukan pada masa itu cukup ketat terhadap dunia pers. Seiring perkembangan dan adanya pengaruh kaum liberal di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 membuat perkembangan surat kabar swasta berkembang dengan pesat.

Surat kabar di Hindia Belanda dipengaruhi oleh perkembangan surat kabar di Eropa dan Tiongkok yang memiliki perkembangan lebih maju.<sup>25</sup> Tiongkok memulai perkembangan surat kabar pada abad ke-11 yaitu sejak surat kabar

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.15

<sup>25</sup> Farisda Amalia, "Pewarta Soerabaia Sebagai Media Komunikasi Nasionalisme Tiongkok Masyarakat Tionghoa Surabaya tahun 1937-1940", *Avatara*, Vol.5, No.1, 2017.hlm.1536

*Chaobao* dan *Xiaobao*. Pertumbuhan industri percetakan di Tiongkok semakin masif setelah ditemukannya mesin cetak berbahan tanah liat.<sup>26</sup> Sebelum adanya percetakan di Eropa, informasi dicatat secara manual oleh ahli tulis dalam ruangan dalam jangka waktu yang cukup lama. Percetakan di Eropa mengalami kemajuan pada tahun 1450, dengan penemuan baru memanfaatkan logam untuk menciptakan cetakan yang lebih tahan lama, mempercepat proses pencetakan, dan memperkenalkan sistem pengecoran yang memudahkan produksi hingga awal abad ke-19 di Eropa. Selain mengembangkan mesin cetak baru, Jerman juga menjadi negara pertama di Eropa yang menerbitkan surat kabar.

Mesin percetakan pertama yang ada di Hindia Belanda awalnya dibawa oleh para Misionaris Belanda.<sup>27</sup> Kepemilikan mesin cetak pada masa itu sangat terbatas. Bumiputera di Hindia Belanda mengalami keterbelakangan baik sosial ekonomi dan Pendidikan dibandingkan bangsa asing yang berdatangan, sehingga tidak memungkinkan memiliki mesin percetakan. Produk percetakan pada masa ini tidak lain kitab-kitab keagamaan dan berkas-berkas terkait berbagai kebijakan politik.

Kebijakan politik Belanda terhadap koloninya mengalami transformasi pada awal abad ke-20, dipengaruhi oleh penguasaan kaum liberal di parlemen Belanda. Kaum liberal memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan terhadap negara jajahan Belanda, dengan prinsip utama yang di usung adalah kebebasan dan persamaan derajat. Prinsip ini mendorong upaya memberikan tingkat kesejahteraan yang setara untuk Hindia Belanda sebagai negeri jajahan.

---

<sup>26</sup> *ibid*, hlm.14

<sup>27</sup> Ahmat Adam, *Sejarah awal pers dan kebangkitan kesadaran keindonesiaan, 1855-1913*. Jakarta: Hasta Mitra. 2003, hlm.2.

Tokoh-tokoh yang berperan terhadap perubahan kebijakan Belanda terhadap Hindia Belanda muncul seiring berkuasanya kaum liberal.<sup>28</sup> Para tokoh tersebut menciptakan suatu gagasan baru terhadap negeri jajahan yang dikenal dengan nama politik etis. Pada dasarnya politik etis bermula dari tulisan yang menghimbau pemerintah Belanda untuk membuat perhitungan keuangan bagi tanah jajahan yang berkekurangan. Kemudian pada tahun 1901 setelah Pemilihan Umum di Belanda terjadi perubahan gambaran politik sesuai pesan kerajaan agar bertanggung jawab terhadap moral rakyat di Hindia Belanda, sehingga diberlakukanlah Politik Etis di Hindia Belanda.<sup>29</sup>

Pemerintahan Hindia Belanda menyebutkan terdapat tiga prinsip sebagai dasar kebijakan politik etis di Hindia Belanda yaitu edukasi, emigrasi dan irigasi. Terdapat tiga periodisasi pada masa politik etis di Hindia Belanda, periode pertama tahun 1894-1905 yang merupakan masa penanaman kekuasaan, periode kedua tahun 1905-1920 merupakan zaman pembangunan, dan periode terakhir yaitu tahun 1920-1942 periode konsolidasi dan pergeseran tekanan di mana mulai diberlakukannya politik etis yang konservatif.<sup>30</sup> Pelaksanaan politik etis sendiri memerlukan dana yang cukup besar mencapai sekitar 40 juta *gulden*<sup>31</sup> yang diambil alih oleh pemerintah Belanda.<sup>32</sup> Politik etis menjadi metode penguatan kekuasaan

---

<sup>28</sup> Elsbeth Locher-Scholten, *Etika yang Berkeping-keping, Lima Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Kolonial 1877-1942*. Jakarta: Djambatan. 1996, hlm.237

<sup>29</sup> Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia. Terj. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. 1984.hlm. 51

<sup>30</sup> Elsbeth Locher Scholten, op cit, hlm 270.

<sup>31</sup> Gulden adalah sekeping mata uang berbentuk bundar pipih, bahan dari perak yang digunakan pada masa pemerintahan Kolonial Belanda atau setara dengan emas. Pada 1914, nilai tukar Gulden mencapai 2,46 Gulden = 1 USD

<sup>32</sup> M.C. Ricklefs, *Polarising Javanese Society: Islamic and Other Visions 1830-1930*, Singapore: NUS Press, 2007, hlm. 228

Belanda dengan mengisi birokrasi oleh kaum terdidik baik Bumiputera ataupun tidak. Pemerintahan Belanda mendirikan sekolah di berbagai wilayah Hindia Belanda terutama Jawa. Berbagai jenis sekolah tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Konteks pendidikan di masa ini berprinsip memenuhi kebutuhan tenaga kerja rendah di kantor-kantor pamong praja atau lainnya.<sup>33</sup> Belanda menetapkan tiga jenis tingkatan Pendidikan yaitu Pendidikan rendah, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi yang dimana pada masa ini sekolah hanya terbatas pada keluarga elit Bumiputera.

Sekolah guru pada masa ini juga berkembang, karena memiliki peran penting khususnya bagi murid yang akan menjadi guru sekolah rendah yang jumlahnya cukup banyak. Hal ini juga merupakan strategi pemerintah Belanda agar tidak perlu membayar guru Belanda. Guru pada saat itu menjadi profesi yang sangat dibutuhkan yang justru sebagai langkah permulaan dalam usaha melawan pemerintahan Belanda. Jumlah guru yang meningkat menciptakan harapan seiring lahirnya para terpelajar yang akan memperjuangkan kemerdekaan.

Strategi pemerintah Belanda yang memperkerjakan para Bumiputera elit di percetakan guna menghemat pengeluaran, menjadi keterampilan tambahan bagi para golongan terpelajar tersebut. Keterampilan yang didapat membuka para golongan terpelajar untuk membuat surat kabar Bumiputera dengan berbagai tujuan, namun yang paling utama untuk menyuarakan hak-hak dan aspirasi Bumiputera kepada Pemerintahan Belanda. Nilai-nilai dan rasa kesadaran tumbuh

---

<sup>33</sup> Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia, 2011 hlm 56

dari dampak politik etis yang menambah semangat perjuangan para golongan terpelajar.

Tokoh-tokoh golongan terpelajar tersebut mulai sadar akan pentingnya surat kabar bagi para Bumiputera dan menyalurkan berbagai kepentingan terkait Bumiputera. Dibandingkan dengan surat kabar Belanda ataupun Tionghoa yang hanya terkait kepentingan ekonomi dan himbauan dari pemerintahan serta kepentingan golongan tertentu. Wadah penyalur aspirasi yang terjangkau, lantang memperjuangkan hak, sumber pendidikan dan bacaan, serta media periklanan ekonomi Bumiputera dan hal-hal terkait Bumiputera, diperlukan dalam rangka memperbaiki kondisi Bumiputera yang memprihatinkan saat itu. Dorongan dari berbagai faktor dan kesadaran golongan terpelajar melahirkan surat kabar Bumiputera sebagai respon atas kebutuhan tersebut.

### **2.3 Munculnya Surat Kabar Berbahasa Sunda**

Masyarakat Sunda menjadi masyarakat Pibumi pertama yang bersentuhan dengan bangsa Belanda sejak kedatangan mereka di Banten pada tahun 1596 hingga tahun 1677, di mana seluruh tatar Sunda berada di bawah kontrol VOC. Etnis Sunda mayoritas mendiami wilayah Priangan yang sebelum tahun 1950 wilayah Priangan masih bersifat keresidenan.<sup>34</sup> Keresidenan Priangan memiliki pengaruh besar dalam tatanan pemerintahan karena kekayaan alamnya yang melimpah, menjadikan Priangan sebagai wilayah masyarakat agraris yang penting. Etnis Sunda yang mendiami pulau Jawa menjadi salah satu tujuan para bangsa asing yang datang.

---

<sup>34</sup> Nina Lubis H, *Kehidupan Kaum Ménak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 2020, hlm. 41-43

Priangan yang pada tahun 1871 mengalami pembagian menjadi beberapa keresidenan. Tiap keresidenan kemudian terbagi lagi menjadi beberapa kabupaten. Keresidenan Priangan, yang terdiri dari sembilan *afdeeling*<sup>35</sup>, antara lain Cianjur, Sukabumi, Bandung, Cicalengka, Sumedang, Limbangan, Tasikmalaya, Sukapura, dan Sukapura Kolot.<sup>36</sup> Dengan luasnya cakupan Priangan dan segala kekayaannya, wilayah ini berkembang menjadi wilayah yang sangat penting bagi pemerintahan kolonial.

Priangan telah menjadi wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama hasil pertanian seperti teh, kopi, dan padi.<sup>37</sup> Kondisi geografisnya yang berada di dataran tinggi membuat Priangan menjadi salah satu pusat produksi pertanian yang berperan besar pada masa kolonial. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, keadaan masyarakat Priangan sangat bergantung pada lahan agraris yang mereka miliki. Kebijakan yang ditetapkan pada masa tersebut seringkali menyengsarakan masyarakat Priangan, baik dalam sistem sewa tanah maupun pembelian hasil tani, dan sebagainya.

Wilayah Priangan menjadi pusat kegiatan budaya, telah lama dikenal dengan kearifan lokalnya, termasuk budaya Sunda yang kaya dan beragam. Penggunaan bahasa Sunda dalam komunikasi masyarakat mempermudah karena pada masa itu khususnya masyarakat Priangan Bahasa Sunda menjadi bahasa yang dipelajari oleh para pendatang asing yang datang ke wilayah koloni. Para pendatang mempelajari dan mendalami bahasa koloni agar dapat mempermudah komunikasi, termasuk

---

<sup>35</sup> Afdeeling adalah wilayah administratif pada masa pemerintahan Belanda yang setara dengan Kabupaten/Kota.

<sup>36</sup> Nina Lubis H, *op cit*, hlm. 428

<sup>37</sup> Lasmiyati, "Kopi di Priangan Abad Xviii-xix". *Patanjala*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm.230

dalam menggunakan bahasa Sunda. Hal tersebut membuat priangan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan budaya semasa kolonial Belanda.

Masyarakat Priangan terbagi dalam tiga tingkatan sosial, yaitu *menak*, *santana*, dan *somahan*. Kedudukan seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk keturunan, posisi dalam birokrasi pemerintahan, dan kepemilikan tanah.<sup>38</sup> Perlakuan yang diterima oleh masyarakat bervariasi tergantung pada tingkatan sosial yang dimiliki. Dalam hal pendidikan, golongan *menak* mendapatkan akses ke pendidikan yang terpisah, khusus untuk kaum *menak*. Sementara itu, masyarakat selain golongan *menak* diberi kesempatan untuk bersekolah, dimulai dari sekolah dasar kelas satu dan kelas dua, serta tersedia juga sekolah menengah umum atau sekolah lanjutan khusus untuk kejuruan seperti pertukangan. Dengan demikian, struktur sosial yang kompleks di Priangan tidak hanya memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga akses mereka terhadap aspek kehidupan salah satunya pendidikan yang lebih lanjut.

Pemerintahan kolonial Belanda menjadikan Priangan daerah yang memiliki perkembangan sistem Pendidikan yang maju. Tokoh-tokoh golongan terpelajar Priangan lahir untuk memajukan sistem perkembangan intelektual di Priangan. Para misionaris Belanda telah mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya di Priangan, membawa konsep pendidikan modern ke wilayah tersebut. Selain itu, tradisi pendidikan tradisional Sunda juga tetap dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi, mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Priangan.

---

<sup>38</sup> Mumuh Muhsin Zakaria, "Struktur Sosial, Politik, dan Pemilikan Tanah di Priangan Abad Ke-19". *Patanjala*. Vol 3, No. 3. (2011). hlm. 50-56.

Dengan adanya akses pendidikan yang semakin meluas, tingkat literasi dan intelektualitas masyarakat Priangan meningkat tercermin dalam munculnya tokoh-tokoh intelektual dan aktivis pendidikan yang berperan dalam mengembangkan sistem pendidikan lokal dan memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi masyarakat Priangan.

Golongan terpelajar di masyarakat Sunda menyadari pentingnya memiliki media pemersatu yang dapat memenuhi kebutuhan bacaan, pengajaran, dan informasi bagi masyarakat, seiring dengan kebutuhan akan pengembangan budaya dan Bahasa Sunda.<sup>39</sup> Kondisi ketertinggalan yang dialami oleh masyarakat Sunda semakin meningkatkan keprihatinan di kalangan golongan terpelajar, mendorong timbulnya kesadaran untuk menyejahterakan masyarakat Sunda. Perkembangan yang dicapai oleh etnis lain dan organisasi pergerakan nasional, yang aktif menggunakan surat kabar sebagai alat untuk menyuarakan pendidikan dan perjuangan terhadap pemerintahan kolonial Belanda, menjadi semangat untuk menciptakan surat kabar berbahasa Sunda. Golongan terpelajar sadar bahwa media cetak ini dapat menjadi sarana efektif dalam mengedukasi masyarakat, memperjuangkan hak-hak mereka, serta mempromosikan kemajuan budaya dan Bahasa Sunda. Dengan demikian, lahirnya surat kabar berbahasa Sunda menjadi tonggak penting dalam upaya memajukan dan membangkitkan kesadaran masyarakat Sunda akan hak-hak serta identitas budaya. Hal ini sejalan dengan teori identitas yang memberikan gambaran kesamaan untuk memahami suatu individu

---

<sup>39</sup> Edi S Ekadjati, *Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Pagoejoeban Pasoendan 1913-1918*, Bandung: Kiblat, 2004, hlm.54

atau organisasi yang melahirkan gerakan dalam kemajuan, dimana bahasa Sunda menjadi identitas yang sama bagi golongan terpelajar.

Pemuda-pemuda Priangan yang menjadi golongan terpelajar memiliki rasa persatuan yang kuat dengan membentuk organisasi kedaerahan. Para golongan terpelajar tersebut sangat mencintai Budaya Sunda.<sup>40</sup> Masyarakat Priangan pada masa ini mayoritas seorang petani dan dikenal taat beragama serta memiliki jiwa kebudayaan yang kuat. Bahasa Sunda sebagai bahasa yang digunakan secara luas oleh penduduk setempat, menjadi alat komunikasi yang sangat penting dalam menyebarkan gagasan-gagasan politik dan memobilisasi massa. Surat kabar yang menggunakan bahasa Sunda menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan berita, pandangan politik, dan wacana kebijakan kepada masyarakat Sunda yang mayoritas di wilayah Priangan. Hal ini karena penggunaan bahasa ibu sebagai identitas mampu menciptakan koneksi emosional dan mengomunikasikan ide-ide politik dengan lebih dekat dan lebih mudah dipahami.

Perjuangan golongan terpelajar terwujud melalui wadah organisasi pergerakan. Masa pergerakan di Priangan memiliki perkembangan pesat secara intelektual, dengan lahirnya berbagai organisasi dan gerakan. Sarekat Islam menjadi salah satu organisasi yang berpengaruh di Priangan. Dalam rangka menyadarkan masyarakat, terutama kalangan bawah Bumiputera yang terbatas dalam akses terhadap informasi terkait pemerintahan kolonial, media penyebaran informasi sangatlah penting. Surat kabar *Tjahaja Pasoendan*, yang diterbitkan oleh

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 51-52

Sarekat Islam muncul sebagai surat kabar berbahasa Sunda pertama di Priangan.<sup>41</sup> Melalui media cetak ini, Sarekat Islam mampu menggerakkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Sunda secara lebih luas dan efektif.

Pengaruh media cetak sebagai sumber informasi dengan segala konten yang diperuntukan untuk menyejahterakan berbagai kalangan Bumiputera di Priangan.<sup>42</sup> Surat kabar ini memenuhi kebutuhan masyarakat berbagai kalangan karena harga yang terjangkau, bahasa yang digunakan mudah dimengerti berbagai kalangan, sehingga surat kabar berbahasa daerah berkembang pesat. Para pejuang dan organisasi-organisasi pergerakan mulai tergerak akan pentingnya media cetak bagi masyarakat Bumiputera yang melahirkan berbagai surat kabar lain. Organisasi pergerakan yang bersifat kedaerahan Pagoejoeban Pasoendan yang menjadi wadah para Intelektual Pasoendan ikut berpartisipasi dengan melahirkan berbagai media cetak guna menunjang tujuan utama organisasi tersebut. Papaes Nonoman sebagai organ Pagoejoeban Pasoendan menjadi surat kabar berbahasa sunda kedua di Priangan.

---

<sup>41</sup> Holy Rafika Dhona, "Wilayah Sunda dalam Surat Kabar Sunda Era Kolonial". *Jurnal Komunikasi*, Vol.11, No.1, 2016, hlm.4

<sup>42</sup> Holy Rafika Dhona, *loc cit.*